

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 298 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nagreg untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nagreg untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN NAGREG

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Nagreg merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Nagreg untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Nagreg yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Nagreg bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Nagreg dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Nagreg agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Nagreg;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Nagreg;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Nagreg.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN NAGREG

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Nagreg dalam menyusun Renja Kecamatan Nagreg.
(2) Renstra Kecamatan Nagreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.
b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Nagreg paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Nagreg; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Nagreg.
c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Nagreg dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Nagreg dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Nagreg; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.
e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Nagreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN NAGREG

Pasal 5

(1) Kecamatan Nagreg melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Nagreg dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Nagreg sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Nagreg terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Nagreg.
(3) Camat Nagreg menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Nagreg.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN NAGREG

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Nagreg dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Nagreg mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Nagreg dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Nagreg, maka Renstra Kecamatan Nagreg dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Nagreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Nagreg terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Nagreg.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 298

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 298 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NAGREG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kecamatan memegang posisi strategis sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa dan kelurahan. Untuk mengoptimalkan peran Kecamatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur secara komprehensif tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya peraturan ini menegaskan bahwa Kecamatan bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga aktor koordinatif dan fasilitatif yang penting dalam memperkuat pemerintahan lokal, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan unit kerja terdepan yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan jangka menengah yang terstruktur dan terarah menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Renstra Kecamatan juga disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 -2029. Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini menjadi acuan dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Melalui Renstra, Kecamatan dapat memastikan bahwa setiap program kerja yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, indikator yang terukur, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selain itu, dinamika pembangunan dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adanya strategi yang adaptif dan responsif dari pemerintah Kecamatan. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah kerja Kecamatan. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah maka sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus memiliki Renstra dengan tata cara dan mekanisme penyusunan yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang–undangan maupun SOP yang ada pada masing–masing perangkat daerah.

Renstra Kecamatan pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi Kecamatan yang menentukan strategi atau arah kebijakan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, yaitu secara teknis Renstra

merupakan penjabaran dari RPJMD pemerintah daerah. Renstra Kecamatan sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan, dan subkegiatan setiap urusan bidang yang ada di Kecamatan untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam pelaksanaannya Renstra Kecamatan merupakan dokumen penting, karena Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Renja yang memuat prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Yang penganggarannya dituangkan dalam RKA dan DPA Organisasi, sehingga dokumen Renstra merupakan produk dokumen yang sangat penting guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien sebagai bahan penyusunan dokumen lainnya (Renja, RKA, DPA, LKIP, dan LKPJ), sehingga Renstra mempunyai bobot penilaian paling tinggi dalam unsur SAKIP.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Nagreg sebagai penjabaran RPJMD sesuai tugas, kewenangan, dan fungsinya adalah merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan Renstra memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung untuk mengatur strategi dan kebijakan pada Renstra Kecamatan sehingga terjadi satu arah yang sinergis antara Renstra Kecamatan dengan RPJMD.

Selain sinergi dengan RPJMD, Renstra Kecamatan memperhatikan pula keterkaitan dengan Renstra kementerian/lembaga, provinsi, serta memperhatikan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan telaahan rencana tata ruang wilayah yang tujuannya agar perencanaan menjadi komprehensif dari berbagai sudut kepentingan dari pusat sampai daerah.

Renstra Kecamatan Nagreg disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bandung. Renstra ini menjadi acuan bagi Kecamatan Nagreg dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan serta pembangunan di wilayah kerja Kecamatan selama periode 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);

16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk menjabarkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.3.1. Maksud

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 memiliki maksud sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka

menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Renja tahunan. Rencana kerja dan penetapan kinerja Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

1.3.2. Tujuan

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 kedalam RKPD.
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan program kerja operasional Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025–2029.
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Nagreg, menjaga eksistensi organisasi, dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten Bandung.
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Bab ini merupakan bagian awal dari isi laporan yang menjelaskan gambaran umum mengenai latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi

Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Dasar Hukum Penyusunan yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Maksud dan tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Serta sistematika penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NAGREG

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Nagreg dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Nagreg dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Adapun isi bab ini terdiri dari gambaran pelayanan Kecamatan Nagreg yang berisi pembahasan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Nagreg, sumber daya Kecamatan Nagreg, kinerja pelayanan Kecamatan Nagreg, kelompok sasaran layanan dan mitra Kecamatan Nagreg dalam memberikan pelayanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang berisi pembahasan mengenai penelaahan RPJMN 2025-2029, penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan

Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, permasalahan pelayanan Kecamatan Nagreg dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan apa yang ingin dicapai (tujuan), hasil spesifik yang diharapkan (sasaran), bagaimana cara mencapainya (strategi), dan prioritas kebijakan yang diambil (arah kebijakan) dalam kurun waktu Renstra 2025–2029. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Nagreg mengenai apa yang ingin dicapai serta sasaran yang lebih terukur mengenai hasil yang harus dicapai, lengkap beserta dengan indikatornya. Strategi Kecamatan Nagreg dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 yang menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi Kecamatan Nagreg dalam lima tahun mendatang. Serta arah kebijakan Kecamatan Nagreg dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025–2029 yang menjelaskan rumusan pernyataan arah kebijakan Kecamatan Nagreg dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka operasional pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Nagreg, mulai dari uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang menjelaskan mengenai uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif. Dikemukakan juga indikator kinerja Kecamatan Nagreg yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah yang memuat uraian lengkap tentang subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Nagreg, bagaimana subkegiatan tersebut mendukung program prioritas pembangunan daerah, indikator kinerjanya, serta output yang dihasilkan. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-

2029 melalui IKU PD yang berisi penjabaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target capaian tiap tahunnya. Serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui IKK yang berisi penjabaran kinerja Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta berisi rincian target kinerja kegiatan/subkegiatan yang mendukung urusan pemerintahan daerah, diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), lengkap dengan target capaian tahunan 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Adapun kesimpulan memuat ringkasan arah kebijakan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dijalankan, serta menegaskan kembali peran Kecamatan Nagreg dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Kaidah Pelaksanaan yang memuat prinsip, pedoman, dan mekanisme bagaimana Renstra Kecamatan Nagreg dijalankan dan dihubungkan dengan dokumen Renja tahunan serta dikendalikan melalui monitoring dan evaluasi. Serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memuat tentang mekanisme bagaimana Kecamatan Nagreg melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra agar program/kegiatan benar-benar sesuai sasaran dan target kinerja dapat tercapai.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NAGREG

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Nagreg

Kecamatan Nagreg merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan masyarakat pada tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, Kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat administratif maupun teknis kepada masyarakat. Gambaran pelayanan ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pelayanan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Pelayanan Kecamatan Nagreg mencakup layanan administrasi, sosial, perizinan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya penguatan yang sistematis, pelayanan Kecamatan Nagreg dapat semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Nagreg

1. Dasar hukum pembentukan Kecamatan Nagreg

   Wilayah Kecamatan Nagreg pada mulanya merupakan wilayah Kecamatan Cicalengka dan dinaikkan statusnya menjadi Kecamatan Perwakilan (Kecamatan Nagreg) dan pada tahun 2001, perwakilan Kecamatan Nagreg dibentuk menjadi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah.

2. Kedudukan Kecamatan

   Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dimana berarti kedudukan Kecamatan merupakan Lembaga Pelaksana Teknis Kewilayahan

sebagai unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di wilayah kerjanya.

3. Tugas pokok dan kewenangan

Tugas pokok Kecamatan secara umum diatur dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan Trantibum;
d. Mengoordinasikan Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan UU;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kab/kota yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

4. Rincian tugas pokok

A. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi :
   a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional;
   d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
b. Mengkoordinasikan bahan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan/atau lembaga/organisasi terkait;
c. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
e. Mengkoordinasikan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
f. Mengkoordinasikan pembinaan penggunaan lahan, pengelolaan usaha tani, peternakan dan pemasaran

hasil pertanian serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani lainnya;

g. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
h. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
i. Memfasilitasi pelatihan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha atau memulai mengembangkan usahanya, sesuai dengan potensi kemampuan local, seperti Olahan Makanan, Pakaian Jadi, Kerajinan dll
j. memfasilitasi upaya peningkatan SDM di pedesaan, terutama untuk masyarakat yang belum bisa melanjutkan pendidikan dasarnya di jenjang pendidikan SLTP dan SLTA melalui program paket B dan C;
k. memfasilitasi kegiatan IPSM dalam penanganan PMKS (tuna rungu, tuna wicara, cacat fisik dan mental);
l. pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemuda dan Karang Taruna di bidang olahraga bulu tangkis, tenis meja, bola voli dan senam;
m. menyiapkan bahan rekomendasi bantuan hibah bansos bagi kelompok masyarakat dan perorangan;
n. memfasilitasi pemberian rekomendasi dibidang pendidikan, kesehatan, budaya dan pariwisata;
o. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang pemuda dan olahraga;
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi sosial budaya;
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

C. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan trantibum;

a. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait;
d. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di wilayah kerjanya;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di wilayah kerjanya;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan pangkalan gas serta minyak tanah;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
k. menindak, dan memproses dan /atau menindaklanjuti permasalahan pelanggaran kebersihan ketertiban dan kesehatan yang ada di wilayah kerja;
l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.

D. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada:
   a. pendataan administrasi dan perizinan terhadap perusahaan Galian C;
   b. pendataan administrasi dan perizinan toko modern/mini market;
   c. pendataan dan penertiban pedagang kaki lima;
   d. melaporkan permasalahan ke tingkat Kabupaten Bandung terkait dengan permasalahan dan penegakan Perda dan Perkada;
   e. melayani dan menangani pengaduan dari masyarakat;
   f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya;

E. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pembangunan;
   b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data seksi pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
   c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
   d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi pembangunan;
   e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
   f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang Kecamatan;
   g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes;
   h. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten;

i. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
j. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD provinsi;
k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
l. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan;
m. mengoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis maupun non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan di wilayah kerjanya;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

F. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
p. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

G. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;

H. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan UU;

5. Pelimpahan kewenangan

Berdasarkan pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Camat selain melaksanakan tugas yang bersifat atributif, juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang bobotnya diukur berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan yang secara teknis rinciannya diatur oleh daerah kabupaten/kota.

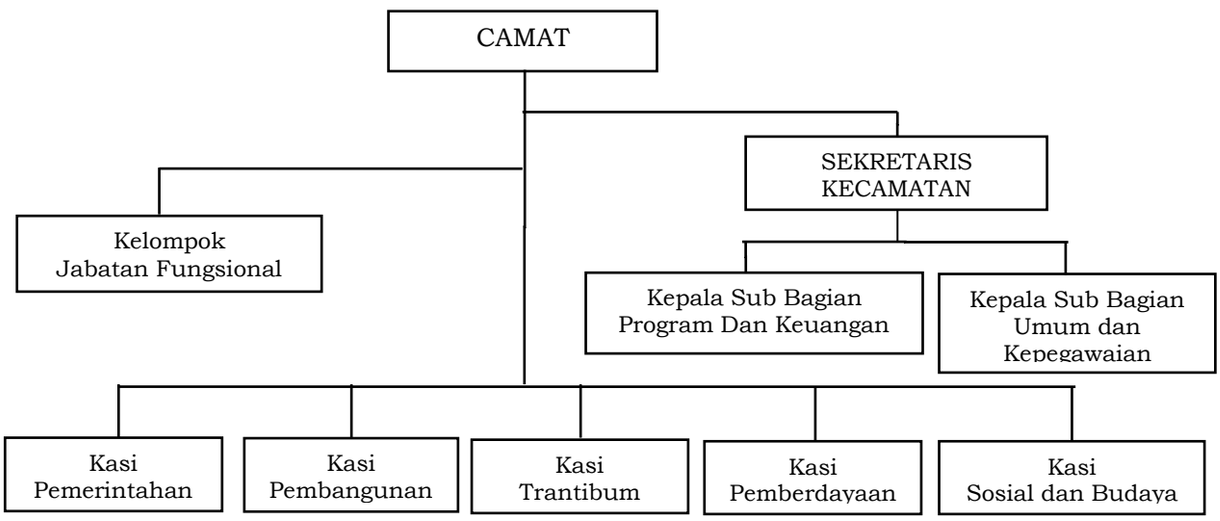
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi,

pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kapasitas kewenangan yang ada di Kecamatan.

6. Struktur organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Nagreg dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah, khususnya Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan serta Peraturan Bupati Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kecamatan. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur organisasi di Kecamatan Nagreg.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Nagreg



Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Nagreg, 2025

7. Tugas dan fungsi pejabat struktural di Kecamatan

Tugas dan fungsi struktural di Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

A. Camat

1. Camat tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan

tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan;

2. Camat mempunyai fungsi:
   a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
3. Camat mempunyai sub tugas sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya;
   b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
   c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;
   d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui:
      1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
      2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan - perundang-undangan;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
14. fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;

f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat daerah terkait;
g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;
h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum;
i. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
j. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya;
k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
l. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
m. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

n. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
p. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
q. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Kecamatan;
s. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
t. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
v. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
x. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan
y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Camat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas, dapat melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan Camat menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Kecamatan.

B. Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan;
2. Sekretaris mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
   c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
   e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
   f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
3. Sekretaris mempunyai sub tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
d. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
e. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari Seksi;
f. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga kedinasan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan,perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
h. mengkoordinasikan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
i. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan berdasarkan pendoman dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
k. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;
l. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja laindan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
o. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
q. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
r. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
t. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
v. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

w. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
x. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
y. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan pelaksana;
z. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Kecamatan;
aa. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
bb. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada pimpinan;
cc. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan;
dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinansesuai dengan bidang tugasnya; dan
ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas dapat melaksanakan:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
      1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
         a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Kecamatan;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Kecamatan;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- Kecamatan;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Kecamatan;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan; dan
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kecamatan;
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan;
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kecamatan; dan
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kecamatan;
b. Pengamanan Barang Milik Daerah Kecamatan;
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Kecamatan;

d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Kecamatan;
e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Kecamatan;
f. Penatausahaan Barang Milik Daerah padaKecamatan; dan
g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kecamatan.

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
   b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
   c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah;
   d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
   e. Pengolahan Data Retribusi Daerah;
   f. Penetapan Wajib Retribusi Daerah; dan
   g. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
   b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
   e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
   g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
   h. Pemindahan Tugas ASN;

i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Perundang-Undangan.

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Perundang-undangan;
   g. Penyediaan Bahan/Material;
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan;
   j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada Kecamatan; dan
   k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pengadaan Alat Besar;
   d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
   e. Pengadaan Mebel;
   f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
   h. Pengadaan Aset Tak Berwujud;

i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor; dan
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
   d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
   e. Pemeliharaan Mebel;
   f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
   h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
   i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya;
   j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan subkegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan; dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
5. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Nagreg

1. Sumber daya aparatur/pegawai Kecamatan Nagreg

Kecamatan Nagreg dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 33 orang pegawai, terdiri dari 21 orang tenaga ASN, 2 orang PPPK, dan 10 orang tenaga non ASN dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Tenaga Non ASN dan selain itu ditambah tenaga LINMAS dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tenaga ASN yang ada telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disisi lain karena kebutuhan mendesak dan perlu adanya saling bantu, maka dalam pekerjaannya secara insidentil

bisa dapat saling membantu dan saling mengisi sehingga terjalin kebersamaan yang menguatkan solidaritas diantara PNS.

Capaian kinerja di Kecamatan Nagreg tidak terlepas pula dari adanya kontribusi tenaga non ASN yang rata–rata berusia muda dan mempunyai kemampuan dibidang IT dan mempunyai akselerasi sehingga keberadaannya dapat menunjang terhadap kinerja Kecamatan Nagreg, perpaduan tenaga PNS dan non ASN di Kecamatan Nagreg menjadi kekuatan kinerja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Berikut ini merupakan rincian daftar pegawai Kecamatan Nagreg yang dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1 Pegawai Kecamatan Nagreg berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	Laki – laki	17	1	7	25
2	Perempuan	4	1	3	8
Jumlah		21	2	10	33

Sumber: DUK Kecamatan Nagreg, 2025

Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian						Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Gol IV	2						2
2	Gol III	3	8		1			12
3	Gol II		7					7
4	Gol I							
5	Gol 7						1	1
6	Gol 5					1		1
Jumlah		5	15		1	1	1	23

Sumber: DUK Kecamatan Nagreg, 2025

Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian						Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	SD							
2	SMP							
3	SMA	6	1			1		8
4	D3	1						1
5	S1	5	2		1		1	9

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian						Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
6	S2	5						5
Jumlah		17	3		1		2	23

Sumber: DUK Kecamatan Nagreg, 2025

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Nagreg berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SMA, sarjana, dan pascasarjana. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Nagreg didominasi oleh pegawai berpendidikan SLTA. Kecamatan Nagreg sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai di dalam membangun proses perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar satuan kerja di Kecamatan Nagreg.

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Nagreg juga telah mengikuti pendidikan struktural, untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Nagreg yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Eselon Tahun 2020-2025

No.	Eselon	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklatpim	%
1	III a	1	Diklatpim III	
2	III b	1	-	
3	IV a	5	Diklatpim IV	
4	IV b	-	-	
	Jumlah	7 Orang	-	

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Nagreg, 2025

2. Sumber Daya Aset/BMD

Aset daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan milik daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Aset tersebut tidak hanya bernilai sebagai barang milik daerah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penunjang operasional yang membantu tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Di Kecamatan Nagreg, aset daerah yang dikelola mencakup berbagai jenis sarana dan prasarana yang digunakan untuk

menunjang aktivitas pemerintahan sehari-hari, baik berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan dinas, maupun aset lainnya. Keberadaan aset tersebut menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar administrasi pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aset daerah yang dikelola OPD Kecamatan Nagreg dapat dilihat pada tabel yang terlampir dibawah ini.

Tabel 2.5 Data Aset di Kecamatan Nagreg

No	Jenis Aset	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	Baik dan tidak berkurang	Digunakan gedung Kantor, GOR, dan Aula
2	Peralatan dan Mesin	Baik/sedang/rusak	Perlu perbaikan
3	Gedung dan Bangunan	Baik	Perlu Penataan/Rehab
4	Aset Tetap Lainnya	-	-

Sumber: Data Pengelola Aset Kecamatan Nagreg, 2025

Untuk lima tahun ke depan dengan Renstra yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada pengadaan aset dan pemeliharaan diarahkan pada modernisasi alat kerja/penunjang kerja (*hardware, software*) dan pengadaan/pemeliharaan gedung dengan memperhatikan estetika, dan harus representatif dengan segala penunjang atau pendukungnya sesuai ketentuan pada layanan publik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Nagreg dapat dilihat atau dicermati dalam Renstra periode sebelumnya (periode tahun 2021–2026) dimana Kecamatan Nagreg telah melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator dan target yang harus dicapai.

2.1.3.1. Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Nagreg

Kecamatan Nagreg merupakan salah satu kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Nagreg memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur penghubung antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Kondisi wilayahnya didominasi oleh dataran perbukitan dengan ketinggian bervariasi, serta sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman penduduk.

Adapun batas-batas administratif Kecamatan Nagreg adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Blubur Limbangan (Kabupaten Garut) dan Kecamatan Cicalengka (Kabupaten Bandung);
- Sebelah Timur: Kecamatan Blubur Limbangan dan Kadungora (Kabupaten Garut);
- Sebelah Selatan: Kecamatan Cikancung (Kabupaten Bandung) dan Kecamatan Kadungora (Kabupaten Garut);
- Sebelah Barat: Kecamatan Cicalengka (Kabupaten Bandung);

Kecamatan Nagreg terdiri atas beberapa desa yang menjadi wilayah administrasi pemerintahan, antara lain:

Tabel 2.6 Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan Nagreg

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Nagreg	208,00 Ha
2	Citaman	342,60 Ha
3	Ciaro	847,46 Ha
4	Ciherang	726,00 Ha
5	Bojong	741,00 Ha
6	Mandalawangi	536,00 Ha
7	Nagreg Kendan	308,00 Ha
8	Ganjarsabar	316,00 Ha
	Total Luas	4.025,06 Ha

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Nagreg terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai peladang, petani, buruh tani, dan peternak. Selain itu, terdapat pula kelompok masyarakat yang bekerja di luar daerah, mengingat Nagreg adalah wilayah perlintasan dengan akses transportasi yang cukup baik.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kecamatan Nagreg

No	Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Total (Orang)
1	Jumlah penduduk tahun ini	30.375	28.960	59.335
2	Jumlah penduduk tahun lalu	29.815	28.608	58.423

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Tabel 2.8 Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Nagreg

No	Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Total
1	Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	16.464	1453	17.917
2	Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	15.688	1516	17.204

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Tabel 2.9 Klasifikasi, Kategori, dan Tipologi Desa di Kecamatan Nagreg

No	Desa	Klasifikasi	Status/Kategori	Tipologi
1	Mandalawangi	Swadaya	Mandiri	Perladangan
2	Bojong	Swasembada	Mandiri	Perladangan
3	Ciherang	Swasembada	Mandiri	Perladangan
4	Ciaro	Swakarya	Mandiri	Perladangan
5	Nagreg	Swasembada	Mandiri	Perladangan
6	Citaman	Swasembada	Mandiri	Persawahan
7	Ganjarsabar	Swakarya	Mandiri	Peternakan
8	Nagreg Kendan	Swakarya	Mandiri	Perladangan

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Tanggung jawab dan tugas Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari atributif, delegatif dan tugas pembantuan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, upaya optimalisasi pembangunan memerlukan perencanaan yang mampu merefleksikan penyelesaian berbagai permasalahan melalui strategi dan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan serta dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan tersebut merupakan sebagian dari kewenangan bupati/walikota kepada camat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan di Kecamatan Nagreg adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

   Dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Nagreg bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengurusan surat

keterangan, fasilitasi dokumen kependudukan, hingga layanan pengaduan masyarakat. Peran ini menjadikan Kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

   Melalui pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan berfungsi mendorong pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha mikro, serta mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani. Upaya pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat serta partisipasi dalam pembangunan desa.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

   Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum menjadikan Kecamatan sebagai perpanjangan tangan bupati. Kecamatan bertugas menjaga stabilitas wilayah, memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mengoordinasikan penanggulangan bencana, hingga memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga atau antar desa. Fungsi ini penting untuk memastikan pemerintahan berjalan tertib dan harmonis.

4. Penunjang Pemerintahan Daerah

   Kecamatan Nagreg berperan sebagai penghubung koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah desa. Kecamatan juga membantu sinkronisasi program pembangunan daerah dengan aspirasi desa serta menyediakan data sektoral sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan daerah dapat terimplementasi lebih tepat sasaran.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Dimana Kecamatan Nagreg diposisikan sebagai fasilitator keamanan wilayah. Melalui koordinasi dengan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas, Kecamatan berupaya menjaga kondusifitas wilayah, mencegah konflik sosial, serta

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peraturan.

6. Pembinaan dan Pengawasan Desa

   Kecamatan Nagreg memiliki tanggung jawab membina kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, memberikan arahan dalam penyusunan peraturan desa, serta membantu menyelesaikan permasalahan antara pemerintah desa dan masyarakat.

2.1.3.2. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020–2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Evaluasi ini tidak hanya mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta relevansi pelaksanaan program terhadap tujuan pembangunan daerah. Melalui penyajian hasil evaluasi ini, diharapkan dapat terlihat capaian yang telah berhasil diwujudkan, permasalahan yang masih dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Berikut ini merupakan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85	86	89	90	88,83	89,51	89,61	90,15	103,52%	105,31%	100,69%	100,78%
2	Nilai AKIP				71	72	73	75	71,56	72,35	75,9	77,4	100,78%	100,49	103,97%	103,97%
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik				60	65	70	75	60	67	73	75	100%	100%	104%	100%
4	Persentase Desa Beradministrasi Baik				100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
5	Jumlah Desa Cepat Berkembang				-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100%	100%

Sumber: LKIP Kecamatan Nagreg Tahun 2022-2025

Dari Tabel 2.10 di atas Kecamatan Nagreg mempunyai empat indikator sasaran dan pada baris nomor 5 terdapat indikator perubahan yang merupakan perubahan dari nomor 4 yang dilakukan pada perubahan renstra tahun 2024, sehingga indikator perubahan tersebut berlaku pada semester kedua tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.10 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Target IKM

   Target Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian diperoleh telah melebihi target dengan rasio di atas 100%, hal ini terjadi karena adanya faktor pendorong yang memungkinkan target yang dicapai terus mengalami peningkatan, hal tersebut didukung adanya Sumber daya yang terdiri dari sarana dan prasarana serta SDM layanan meskipun hal tersebut termasuk dalam permasalahan namun dengan optimalisasi melalui pengawasan internal pelayanan dapat berjalan cepat, efektif dan efisien.

2. Capaian Target Nilai AKIP

   Berdasarkan tabel di atas Capaian Kinerja ditujukan pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) capaian nya melampaui target, dan berada pada level BB Kategori, dan pada tahun 2024 meraih nilai 77,40 Kategori BB Dengan kriteria Interpretasi “Sangat Baik”, adapun variabel yang menjadi Evaluasi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Internal (10%) Pencapaian Sasaran.

3. Capaian Target BMD layak pakai

   Capaian BMD telah sesuai dengan target dan Capaian BMD Layak Pakai sangat dipengaruhi oleh adanya penghapusan pada tahun 2023 melalui Sensus BMD, dimana sejumlah BMD dilakukan penghapusan dan telah dikembalikan ke Bagian Aset (BKAD) Kabupaten Bandung.

4. Capaian Target Desa Beradministrasi Baik

   Sesuai Tabel di atas bahwa Capaian Desa beradministrasi baik capaiannya sesuai target dengan rasio rata–rata 100% dan indikator ini melalui perubahan Renstra pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan menjadi

Jumlah Desa yang cepat berkembang dan dilakukan perubahan pada semester kedua tahun 2024.

5. Capaian Target Jumlah Desa Cepat Berkembang

Capaian target jumlah Desa cepat berkembang dilakukan setiap tahun dan berdasarkan tabel 2.6 di atas capaian target ini telah sesuai dengan target yaitu pada akhir renstra mencapai 8 pada triwulan I tahun 2025.

Dari capaian target kinerja yang merupakan capaian pelayanan di Kecamatan Nagreg terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjang faktor pendorong antara lain:

1. Komitmen Pimpinan, dalam hal ini Camat telah memberikan keteladanan dalam penegakan disiplin.
2. Adanya perencanaan yang terukur (realistis).
3. Pengelolaan manajemen risiko.
4. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan internal (SPIP).
5. Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan antar individu ASN maupun Non ASN.
6. Efektivitas Anggaran yang berbasis kinerja (adanya output dan outcome).
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan aplikasi Sakip SIAKANG dan Aplikasi IKM e-SKM kabupaten Bandung dan penggunaan Inovasi Nagreg SIPPINTER.
8. Pengumpulan data kinerja berbasis Cloud melalui GDrive sesuai dengan Rekomendasi dari Inspektorat pada LHP hasil Penilaian AKIP.

Selain faktor Pendorong, dalam pencapaian target, dalam pencapaan target, terdapat pula faktor penghambat antara lan:

1. Belum optimalnya budaya kerja yang baik;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana;
3. Adanya perubahan regulasi;
4. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja.

2.1.3.3. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Nagreg pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Berikut ini merupakan hasil evaluasi capaian dan kinerja Kecamatan Nagreg Tahun 2021-2026.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Nagreg										
07:01	Kecamatan										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	79 Poin	75 Poin	76 Poin	77 Poin	101%	78 Poin	0 Poin	77 Poin	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%		400%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	13 Dokumen	87%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	0%	400%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tujangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/bln	28 Org/bln	26 Org/bln	26 Org/bln	100%	26 Org/bln	26 Org/bln	26 Org/bln	100%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	12 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	80%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296 Orang	148 Orang	37 Orang	37 Orang	100%	37 Orang	0 Orang	185 Orang	63%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	4 Paket	80%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket	63 Paket	21 Paket	21 Paket	100%	21 Paket	0 Paket	84,00	99%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	4 Paket	80%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	10 Paket	0 Paket	8 Paket	80%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	16 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	0 Paket	20 Paket	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen	52 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	13 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	85%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	83%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	4 Paket	80%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	12 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	1 Paket	0 Paket	19 Paket	90%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	5 Unit	100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Peralatan	4 Peralatan	2 Peralatan	2 Peralatan	100%	7 Peralatan	0 Peralatan	2 Peralatan	50%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	2 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	0 Gedung	3 Gedung	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	90 Poin	90 Poin	90 Poin	90 Poin	101%	90 Poin	0 Poin	90 Poin	100%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	300%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LK	5 LK	5 LK	5 LK	100%	100%	0 LK	10 LK	200%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 LK	3 LK	1 LK	1 LK	100%	1 LK	0 LK	4 LK	80%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 LK	3 LK	1 LK	1 LK	100%	1 LK	0 LK	4 LK	80%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	4 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	100%	-	100%	0%	100%	100%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	650 Orang	450 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	0 Orang	600 Orang	92%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 LK	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-							
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	70%
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.023.573.544	5.216.102.295	5.377.561.864	5.832.112.926	5.739.263.899	4.221.878.066	5.166.978.376	5.189.278.701	5.822.664.195	84,04	99,06	96,5	99,84 %	3,10%	0,43%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.296.400	61.000.000	41.000.000	49.058.921	46.806.000	12.296.300	54.107.288	39.362.931	46.234.600,00	100	88,7	96,01	94,24 %	-32,79%	-27,25%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.296.400	7.000.000	15.000.000	22.000.000	17.726.000	12.296.300	6.998.988	14.155.000	20.635.000,00	100	99,99	94,37	93,80 %	114,29%	102,24%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		52.000.000	18.000.000	21.058.921			45.122.900	17.497.931	19.649.600,00		86,77	97,21	93,31 %	-65,38%	-61,22%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.000.000					1.900.000				95			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.000.000	2.000.000	3.000.000,00	17.180.000		1.985.400	1.950.000	2.960.000,00		99,27	97,5	98,67 %	0,00%	-1,78%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2.000.000		3.000.000			2.000.000				100			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			2.000.000	3.000.000,00	2.150.000			1.860.000	2.990.000,00			93	99,67 %		

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					2.150.000										
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					2.300.000										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.350.425.295	4.350.425.295	4.515.253.446	4.761.841.737	4.755.665.703	3.639.937.114	4.342.815.532	4.344.030.735	4.633.333.293	83,67	99,83	96,21	97,30 %	3,79%	0,03%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.350.425.295	4.838.333.000	4.505.253.446	4.761.841.737	4.749.185.703	3.639.937.114	4.342.815.532	4.334.431.235	4.633.333.293	83,67	89,76	96,21	97,30 %	-6,88%	-0,19%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.000.000		2.500.000			2.719.700				90,66			
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.000.000		1.990.000			4.929.800				98,6			
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.000.000		1.990.000			1.950.000				97,5			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000					9.690.000	6.814.000			96,9			

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000					9.690.000	6.814.000			96,9			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.000.000	15.000.000	10.000.000	41.635.328		10.000.000	10.000.000			100	66,67	68,14 %	50,00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10.000.000	15.000.000	10.000.000	41.635.328		10.000.000	10.000.000			100	66,67	68,14 %	50,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.103.400	155.000.000	123.080.000	103.840.000	101.230.000	90.730.321	143.127.657	120.378.049	101.918.500	66,66	92,34	97,8	98,15 %	-20,59%	-15,89%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.308.550	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.307.500	9.205.107,00	4.625.000	4.991.600	24,63	92,05	92,5	99,83 %	-50,00%	-49,76%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.111.850	55.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	34.528.476	54.987.250	14.881.300	14.996.900	78,27	99,98	99,21	99,98 %	-72,73%	-72,94%
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	3.240.493	4.932.300	6.297.200	4.966.000	81,01	98,65	89,96	99,32 %	40,00%	27,67%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.683.000		5.000.000		5.000.000	17.879.500		4.744.900		45,06		94,9			
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	4.958.419		9.950.000	4.994.000,00	61,98	-	99,5	99,88 %	0,00%	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.255.933	4.998.000	10.000.000	9.970.000	85,12	99,96	100	99,70 %	100,00%	100,08%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					5.000.000										
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	70.000.000	71.080.000	63.840.000	46.230.000	24.560.000	69.005.000	69.879.649	62.000.000	81,87	98,58	98,31	97,12 %	1,54%	1,27%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			74.378.900	97.545.400	121.000.000,00			73.593.000	96.893.950			98,94	99,33 %		
	Pengadaan Mebel			74.378.900	10.000.000	58.000.000,00			73.593.000	9.858.450			98,94	98,58 %		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin				87.545.400	63.000.000,00				87.035.500				99,42 %		
	Lainnya															
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.398.868	429.677.000	432.126.868	464.326.868,00	434.926.868	344.837.171	419.849.399	427.854.186	457.902.581,00	83,62	97,71	99,01	98,62 %	0,57%	1,91%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	20.000.000	36.800.000	38.000.000	35.000.000	15.958.523	13.121.933	32.643.786	34.544.821	59,11	65,61	88,71	90,91 %	84,00%	148,77%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.926.868	409.677.000	395.326.868	426.326.868	399.926.868	328.878.648	406.727.466	395.210.400	423.357.760	85,22	99,28	99,97	99,30 %	-3,50%	-2,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.555.000	210.000.000	166.722.650	345.500.000	238.000.000	134.077.160	207.078.500	164.369.800	479.567.271	94,72	98,61	98,59	138,80 %	-20,61%	-20,62%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		11.040.000		3.000.000,00	14.841.500		11.040.000		74,21		100			
	Pemeliharaan Mebel			5.000.000					5.000.000				100			

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.500.000	20.000.000	18.000.000	44.000.000	35.000.000	5.500.000	17.855.400	16.955.000	29.379.400,00	100	89,28	94,19	66,77 %	-10,00%	-5,04%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.365.881	190.000.000		301.500.000	200.000.000	90.729.000	189.223.100		450.187.871,00	98,23	99,59		149,32 %	-100,00%	-100,00%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.007.000		132.682.650			23.006.660		131.374.800		100		99,01			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.340.000	122.000.000	102.427.123	321.374.400	358.859.700	21.965.000	112.069.800	101.208.900		53,13	91,86	98,81		-16,04%	-9,69%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			9.000.000		3.640.000			8.999.900				100			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.000.000		3.640.000			8.999.900				100			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	41.340.000	102.000.000	75.577.123	321.374.400	355.219.700	21.965.000	92.369.800	74.694.200	320.927.000	53,13	90,56	98,83	99,86 %	-25,90%	-19,14%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41.340.000	102.000.000	75.577.123	321.374.400	355.219.700	21.965.000	92.369.800	74.694.200	320.927.000	53,13	90,56	98,83	99,86 %	-25,90%	-19,14%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		20.000.000	17.850.000				19.700.000	17.514.800			98,5	98,12		-10,75%	-11,09%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		20.000.000	17.850.000				19.700.000	17.514.800			98,5	98,12		-10,75%	-11,09%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.435.000	40.000.000	50.920.000	161.030.800	139.880.600	13.435.000	37.125.000	50.558.200	154.829.000	100	92,81	99,29	96,15 %	27,30%	36,18%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.435.000	10.000.000	25.000.000	92.948.400	57.280.000	13.435.000	9.870.000	24.989.800	92.851.000	100	98,7	99,96	99,90 %	150,00%	153,19%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					3.640.000										

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	13.435.000	10.000.000	25.000.000	92.948.400	53.640.000	13.435.000	9.870.000	24.989.800	92.851.000,00	100	98,7	99,96	99,90 %	150,00%	153,19%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		30.000.000	25.920.000	68082400	34.060.600		27.255.000	25.568.400	61978000		90,85	64,5	91,03 %	-13,60%	-6,19%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					4.150.000										
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		30.000.000	16.940.000	27.917.400	9.955.300		27.255.000	16.719.400	22.288.000		90,85	98,7	79,84 %	-43,53%	-38,66%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				25.105.000	9.955.300				24.990.000,00				99,54 %		
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			8.980.000	15.060.000	10.000.000			8.849.000	14.700.000,00			98,54	97,61 %		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					48.540.000										
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					3.640.000										
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran					10.000.000										

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					8.300.000										
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					10.000.000										
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					8.300.000										
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					8.300.000										
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	10.000.000	22.450.000	59.308.800,00	28200000	10.000.000	9.990.000	22.079.900	59.110.000,00	100	99,9	98,35	99,66 %	124,50%	121,02%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	22.450.000	49.308.800,00	20750000	10.000.000	9.990.000	22.079.900	49.170.000,00	100	99,9	98,35	99,72 %	124,50%	121,02%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	26.600.000,00	4.150.000	10.000.000	9.990.000	9.900.000	26.470.000,00	100	99,9	99	99,51 %	0,00%	-0,90%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			12.450.000	22.708.800,00	16.600.000			12.179.900	22.700.000,00			97,83	99,96 %		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00	7.450.000				9.940.000,00				99,40 %		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10.000.000,00	7.450.000				9.940.000,00				99,40 %		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.108.002	59.000.000	97.000.000	121.634.200	70.030.000	11.050.000	58.410.000	96.051.100	121.261.800	99,48	99	99,02	99,69 %	64,41%	64,44%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.108.002	59.000.000	97.000.000	121.634.200	70.030.000	11.050.000	58.410.000	96.051.100	121.261.800	99,48	99	99,02	99,69 %	64,41%	64,44%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.108.002	24.000.000	49.000.000	47.956.000	70.030.000	11.050.000	23.960.000	48.934.100	47.863.600	99,48	99,83	99,87	99,81 %	104,17%	104,23%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		25.000.000	10.000.000	28.778.200	54.000.000		24.700.000	9.717.000	28.648.200		98,8	97,17	99,55 %	-60,00%	-60,66%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		10.000.000	38.000.000	44.900.000	16.030.000		9.750.000	37.400.000	44.750.000		97,5	98,42	99,67 %	280,00%	283,59%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.300.000	40.000.000	63.280.000	114.317.800	47.430.000	50.074.792	39.819.800	62.914.700	112.684.600	99,55	99,55	99,42	98,57 %	58,20%	58,00%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.300.000	40.000.000	63.280.000	114.317.800	47.430.000	50.074.792	39.819.800	62.914.700	112.684.600	99,55	99,55	99,42	98,57 %	58,20%	58,00%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10.000.000		-			9.949.900				99,5			
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	10.000.000	15.000.000	70.000.000	19.300.000	39.999.892	9.820.000	14.700.000	69.576.400,00	100	98,2	98	99,39 %	50,00%	49,69%
	- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.300.000	30.000.000	38.280.000	44.317.800	28130000	10.074.900	29.999.800	38.264.800	43.108.200,00	97,81	99,999	99,96	97,27 %	27,60%	27,55%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

a. Aparatur Kecamatan (ASN dan Non ASN)

Peran Aparatur Kecamatan salah satu Sasaran dalam reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, dan transformasi kelembagaan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi secara signifikan dan lebih jauh memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Bandung lebih BEDAS dengan ASN BERAKHLAK.

b. Masyarakat Umum

Yang menjadi sasaran layanan Publik, baik layanan publik administrasi maupun fasilitasi pendistribusian bantuan sosial, secara umum adalah Masyarakat yang selama ini telah mendapatkan pelayanan secara optimal dari Kecamatan Nagreg termasuk masyarakat kelompok rentan berkebutuhan khusus (disabilitas).

c. Lembaga Kemasyarakat di Kecamatan dan Desa

Lembaga Kemasyarakat, baik di Kecamatan maupun di Desa merupakan kelompok sasaran Pemberdayaan dari Kegiatan kewilayahan melalui kegiatan Pembinaan melalui Bimtek maupun sosialisasi terkait penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan Tugas atributif dan delegatif Camat, sasaran kegiatan terhadap Desa merupakan fasilitasi, koordinasi, dan Pembinaan sekaligus pengawasan baik dalam tata kelola pemerintahan desa maupun keuangan desa.

e. Kelompok Ekonomi Masyarakat

Camat dalam memberikan fasilitasi dan pembinaan salah satunya melalui kelompok ekonomi yang ada di masyarakat antara lain kelompok tani dan UMKM, hal ini dilakukan layanan fasilitasi dan pembinaan.

f. Kelompok Agama dan Budaya

Dalam menjalankan tugasnya, Camat sebagai pimpinan di tingkat Kecamatan sangat berkepentingan untuk melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat dan agama melalui kegiatan

koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang kegiatan agar berjalan tertib dan lancar.

g. Kelompok Pemuda dan Olahraga

Kelompok pemuda dan olahraga merupakan stakeholder bagian penting dari aktivitas Kecamatan, Camat memberikan fasilitasi dan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

2.1.5. Mitra Kecamatan Nagreg dalam Memberikan Pelayanan

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

Sesuai dengan peta relasi dalam pro bisnis, Kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh dinas dan badan di tingkat kabupaten dalam upaya melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui fasilitasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan, Kecamatan menjalin kemitraan dengan desa guna penyampaian informasi terhadap masyarakat dan selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan tugas atributif untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terhadap Pemerintah Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Forum Masyarakat

Kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan forum masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), karang taruna, dan PKK, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus menjadi mitra Kecamatan dalam menjaring dan mengawal aspirasi masyarakat tingkat desa.

5. Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Lokal

   Dunia usaha, koperasi, dan UMKM merupakan mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan ekonomi masyarakat.

6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda

   Keterlibatan para tokoh lokal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat nilai-nilai lokal dalam pembangunan wilayah.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah

   Berperan dalam mendukung program pemberdayaan, advokasi sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

8. Aparat Keamanan (Polsek dan Koramil)

   Dalam konteks ketentraman dan ketertiban umum, Kecamatan juga bermitra dengan aparat keamanan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara kondusif.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Nagreg

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional selama 5 tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam menyusun Renstra serta program tahunan. RPJMN 2025–2029 disusun dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sehingga setiap arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah agar daerah dapat menyusun perencanaan yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan target nasional.

Dengan visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan misi Presiden yang dituangkan dalam

delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah, prioritas, dan target pembangunan Indonesia dalam jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap RPJMN ini penting untuk memastikan bahwa permasalahan pelayanan yang diidentifikasi di tingkat Kecamatan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Nagreg dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal secara tepat.

Dalam mewujudkan transformasi digital, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, hukum berkeadilan, keamanan nasional, stabilitas ekonomi mikro serta regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, pemerintah menetapkan salah satu prioritas nasional yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang merupakan subbagian dari prioritas pembangunan nasional pada nomor 3 sebagaimana tercantum pada RPJMN tahun 2025-2029. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan

keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman. Isu, sasaran dan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg dijabarkan pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi

No	Isu Nasional	Sasaran Nasional	Arah Kebijakan
1	Keterpaduan antara layanan publik belum optimal	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
2	Akses pelayanan publik belum memadai		
3	Proses bisnis dan tata Kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

Dalam menyelesaikan isu nasional terhadap rendahnya ketaatan hukum masyarakat dan penyelenggara negara, pada RPJMN tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan dan akuntabel. Kemudian dalam rangka penyelesaian isu nasional terhadap angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi, pada RPJMN tahun 2025-2029 diarahkan untuk melakukan upaya holistik dan integratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah.

Meskipun Kecamatan bukan merupakan lembaga penegak hukum, namun salah satu sasaran kinerja utama keberhasilan Kecamatan Nagreg yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang salah satunya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pada sektor ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 ayat (2) huruf e bahwa Pengelola Trantibum pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melakukan

kegatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat di bidang pengelola keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan untuk melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2013. Unit Satpol PP dimaksud dipimpin oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan yang secara *ex officio* merupakan kepala unit pelaksana Satpol PP Kecamatan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Selain ketentraman dan ketertiban umum, peran Kecamatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat krusial sebagai unit pemerintahan yang berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan desa-desa di wilayah Kecamatan Nagreg dan juga bersinergi dengan Kepolisian dan tentara Nasional Indonesia.

Dalam konteks pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Kecamatan memiliki posisi strategis untuk mengaplikasikan kebijakan nasional dan daerah kedalam program program yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg. Dengan fungsi koordinasi, edukasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta pengelolaan data yang optimal, Kecamatan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dalam perencanaan strategis Kecamatan, pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya demi terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dalam penyelesaian isu keterpaduan antar layanan publik yang belum optimal, akses pelayanan publik yang belum memadai dan proses bisnis dan tata kelola pemerintahan yang masih terfragmentasi dan tidak efektif, pemerintah menetapkan arah kebijakan transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. Arah 33 kebijakan tersebut bertujuan untuk

mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel salah satunya melalui tata kelola pelayanan publik. Kecamatan Nagreg sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat berkewajiban secara langsung untuk melakukan penataan pelayanan publik yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan daerah membentuk Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari struktur pemerintahan terendah memiliki peran penting untuk menyelaraskan arah kebijakan, indikator, dan program dengan RPJMN. Melalui harmonisasi indikator, sinkronisasi siklus perencanaan, serta penguatan data dan pendanaan, Kecamatan Nagreg dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional sambil tetap mengakomodasi kebutuhan dan potensi lokal.

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD kedalam program dan kegiatan yang terukur dalam jangka menengah.

Sebagai bagian integral dari pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Nagreg yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di wilayah, selalu mengacu kepada visi dan misi pembangunan

Kabupaten Bandung yang berangkat dari potensi dan kondisi yang ada.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju, Dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”. penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Lebih Bedas : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan Masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata Provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan, memiliki arti yaitu Pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berikut 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak serta penguatan kesetaraan gender

melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;

2. meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
5. menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan mempunyai kewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 3 yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Cascading Misi Pembangunan 3



Sumber : RPJMD 2025-2029 Hasil Analisis Bapperida

Penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg, RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia emas. Sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui pelayanan publik yang mudah diakses, prosedur sederhana, serta pemanfataan anggaran secara tepat sasaran. Tranparansi memberi ruang pengawasan masyarakat,

akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban hukum dan moral, efektivitas memastikan tercapainya hasil kebijakan, dan efisiensi mengoptimalkan sumber daya. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kompetensi ASN yang berintegritas, profesional, adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi, termasuk big data, untuk mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan birokrasi yang berkualitas maka peningkatan kepercayaan masyarakat, pelayanan publik dan pembangunan dapat mengalami peningkatan serta berlangsung lebih efektif, cepat, dan berkelanjutan.

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016–2036 dijelaskan bahwa Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Kecamatan Nagreg sebagai salah satu wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten Bandung dalam menentukan Renstra sangat memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah di atas.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan wilayah Kecamatan Nagreg adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Nagreg Termasuk dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS);
2. Nagreg termasuk dalam Pusat pelayanan lingkungan (PPL) adalah kawasan perdesaan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;

3. wilayah Kecamatan berfungsi sebagai perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan, transport alam, agroindustri, kehutanan dan konservasi;
4. untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur berskala Nasional Nagreg termasuk wilayah yang akan dijadikan Proyek Nasional antara lain:
    a. jalan tol Cileunyi – Nagreg – Ciamis – Banjar;
    b. peningkatan jalur ganda KA Koridor Rancaaekek – Cicalengka dan Koridor Cicalengka – Nagreg;
    c. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah diarahkan di Legok Nangka Kecamatan Nagreg.
5. Nagreg termasuk dalam Kawasan Wisata Buatan dengan UMKM pedagang oleh–oleh;
6. Nagreg termasuk kedalam kawasan rawan bencana puting beliung (KLHS);
7. Nagreg kawasan cagar alam geologi dan cagar budaya;
8. Nagreg kawasan ternak unggas dan ternak besar.

Membaca Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2016–2036, untuk wilayah nagreg sangat memungkinkan menjadi sebuah wilayah perkotaan yang berada di wilayah gerbang timur Kabupaten bandung. Dengan adanya rencana proyek pembangunan jalan tol disisi lain merupakan ancaman oleh adanya dampak negatif terhadap keberadaan UMKM pedagang oleh–oleh sehingga sangat perlu adanya fasilitasi, koordinasi dari pemerintah Kecamatan mengenai dampak tersebut, dan untuk proyek pengelolaan sampah, dampak negatif yang akan timbul adalah terjadinya masalah lingkungan sosial, dimana dengan adanya potensi sampah selain mengancam terhadap polusi udara terhadap lingkungan, dan juga resapan air terhadap sumber air yang ada, dan juga timbulnya lingkungan yang kumuh oleh warga pemanfaat sampah tentunya Pemerintah Kecamatan Nagreg telah dan akan melakukan terus koordinasi vertikal dengan pihak yang berkepentingan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Provinsi dan BPSR), untuk Proyek Jalur Ganda KA Koridor Cicalengka Nagreg, Kecamatan Nagreg akan mendorong agar Stasiun Nagreg menjadi trayek Nagreg Bandung sehingga akan membuka akses baru dalam transportasi Darat selain itu adanya kesempatan

UMKM untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut dengan fasilitasi dari PT KAI.

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen KLHS Kabupaten Bandung menyajikan analisis terhadap dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah, termasuk layanan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kabupaten dan Kecamatan. Dalam konteks Kecamatan Nagreg, analisis terhadap hasil KLHS sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah telah mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini meliputi pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi kawasan hijau, serta mitigasi risiko bencana lingkungan.

Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal strategis yang menjadi perhatian dan harus diintegrasikan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nagreg, antara lain:

A. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian limbah domestik dan industri, serta pelestarian kawasan hijau.
B. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.

C. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pelayanan publik, agar kegiatan pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.

D. Pengelolaan risiko bencana berbasis lingkungan, sebagai upaya mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan Kecamatan.

Dengan mengintegrasikan temuan dan rekomendasi dari KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Nagreg, diharapkan program dan kebijakan pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga mendukung terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Nagreg

Pelayanan publik di Kecamatan Nagreg secara umum telah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan strategis ke depan. Permasalahan ini meliputi aspek administratif, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan utama dalam pelayanan Kecamatan Nagreg antara lain:

Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kapasitas Aparatur yang masih belum Optimal dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur baik melalui pelatihan maupun Bimtek 2. Belum optimalnya pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja internal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Sarana prasarana perlu perbaikan dan Rehab Total bahkan perlu adanya Pembangunan tambahan (Gedung baru) dan perlu pembaruan (Peralatan kantor seperti *hardware* maupun *software*)	Daya dukung Perkantoran belum tertata secara optimal	Belum adanya perbaikan dan pemeliharaan maksimal terhadap sarana prasarana yang ada (Gedung dan Peralatan Kantor)
3	Pelaksanaan PATEN belum optimal dilaksanakan	Daya Dukung Sarana dan Prasarana telah mengalami penyusutan atau kerusakan	Belum adanya pemeliharaan yang optimal maupun perbaikan terhadap penunjang Kegiatan PATEN (Ruang layanan dan *Hardware*/ *Software*)
4	Belum berjalannya ruang atau forum komunikasi untuk Pemerintahan Kecamatan, Ulama dan Masyarakat (FKUU)	Belum terjalin komunikasi yang melibatkan seluruh unsur termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh Pemuda	Belum berjalannya program FKUU di tingkat Kecamatan
5	Masih Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk memenuhi dokumen perizinan terutama IMB	Rendahnya Kontribusi Kecamatan terhadap Target PAD dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah	Masih belum optimalnya Sosialisasi tentang intensifikasi PAD melalui Kontribusi Perizinan
6	Masih rendahnya kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Penumpukan Sampah yang sudah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	Penyadaran Masyarakat terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan penegakan Perda tentang pengelolaan persampahan
7	Belum adanya SOP yang terstandar melalui Perdes yang menjadi komitmen bersama untuk rekomendasi perizinan yang berpotensi terhadap kelestarian Lingkungan Hidup dan dianggap masiv membahayakan lingkungan dan masyarakat.	Terjadinya Potensi merusak Kelestarian alam dan tidak tertatanya kawasan pasca aktivitas kegiatan yang mengeksploitasi alam	Komitmen pemerintah Desa dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan potensi alam
8	Masih rendahnya Tata kelola pemerintahan Desa (dilihat dari Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa)	Kapasitas dan efektivitas perencanaan dan Pengelolaan Keuangan belum optimal	Kapasitas SDM Aparatur Desa yang perlu ditingkatkan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Masih lemahnya program pemberdayaan di tingkat Desa khususnya dalam pengelolaan dan permodalan BUMDES	Keberadaan BUMDES sebagai penopang ekonomi kerakyatan dan Desa belum berjalan sesuai harapan	Peningkatan Kapasitas BUMDES melalui Pembinaan dan efektivitas Permodalan dan pengelolaan
10	Masih sangat kurang kegiatan sosial budaya terutama yang terkait dengan seni dan budaya lokal	Kurangnya komitmen terhadap pelestarian seni dan budaya lokal, baik masyarakat maupun lembaga yang ada di Desa	Peningkatan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap perencanaan di Desa

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Dari Tabel 2.14 di atas dapat dilihat permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah, dari hal tersebut yang menjadi permasalahan untuk 5 (lima) tahun ke depan di Kecamatan Nagreg adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan publik di Kecamatan Nagreg belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena masih terbatasnya sarana, prasarana, serta dukungan fasilitas pendukung yang memadai.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian tata ruang wilayah terutama permukiman melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangan Kecamatan.
3. Belum optimalnya ruang atau forum komunikasi untuk Pemerintahan Kecamatan/FORKOPIMCAM, Ulama, dan Masyarakat (FKUU).
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program di tingkat desa belum optimal serta belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala desa.
6. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam perumusan SOP dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.

2.2.6. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka dilakukan perumusan isu strategis pengembangan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk kegiatan lima tahun ke depan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa depan. Apabila isu strategis tersebut tidak diantisipasi, diprediksi akan menimbulkan kerugian yang besar dan/atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk dilakukan. Penentuan isu strategis Kecamatan Nagreg dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan kewilayahan;
2. memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan sektoral kewilayahan;
3. merupakan kondisi/keadaan yang bersifat penting, mendasar dan mendesak;
4. memiliki dampak yang besar dan luas bagi masyarakat jika tidak segera ditangani;
5. memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat diperoleh beberapa isu strategis di Kecamatan Nagreg sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.15 sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Nagreg

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Pelayanan publik di Kecamatan Nagreg belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena masih terbatasnya sarana, prasarana, serta dukungan fasilitas pendukung yang memadai	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Disrupsi Teknologi	Bonus Demografi	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian tata ruang wilayah terutama permukiman melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangan Kecamatan	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Disrupsi Teknologi	Bonus Demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penguatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengendalian tata ruang dan perizinan bangunan
Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah	Belum optimalnya ruang atau forum komunikasi untuk Pemerintahan Kecamatan/FORKOPIMCAM, Ulama, dan Masyarakat (FKUU)	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi koordinasi dan komunikasi lintas unsur antara Pemerintah Kecamatan, FORKOPIMCAM, ulama, dan masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan *circular economy* mulai diterapkan	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
Tugas Atributif dan Delegatif Camat terhadap Desa	Pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program di tingkat desa belum optimal serta belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan keselarasan program desa dengan visi dan misi Kepala Desa
Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam perumusan SOP dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Disrupsi Teknologi	Bonus Demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

Gambar 2.3 Pohon Masalah Kecamatan Nagreg



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah telah merumuskan tujuan dan strategi sebagai arah kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan. Adapun sasaran yang dirumuskan telah disinergikan dengan tujuannya agar hasil yang dicapai dapat terukur.

3.1.1. Tujuan

Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan misi yang diampu Kecamatan, maka tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Tujuan Kecamatan Nagreg dalam Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan publik mencerminkan seberapa baik pelayanan tersebut mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, baik dari segi prosedur, waktu, kepastian, maupun hasil.

Dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik, pemerintah di tingkat Kecamatan masih perlu meningkatkan performa di beberapa sisi yaitu dalam hal manajemen SDM, manajemen data, administrasi keuangan serta pelayanan masyarakat. Dalam manajemen SDM, Kecamatan Nagreg perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui pembinaan pimpinan dan melalui bimtek yang diselenggarakan

langsung oleh Kecamatan yang mengikutsertakan aparatur Kecamatan dalam pendidikan dan pelatihan yang yang diselenggarakan Perangkat Daerah terkait.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tingkat Kecamatan, tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat/Kecamatan dikarenakan hal tersebut merupakan tugas yang melekat pada camat yang diatur dengan perundangan–undangan dan selain itu kewenangan yang diberikan Bupati kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan yang bersifat mandataris yang wajib dilaksanakan meskipun dalam kewenangan tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dikarenakan potensi yang tidak ada maupun tuntutan kebutuhannya yang tidak pasti kuantitasnya dalam ukuran tahunan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan adanya indikator yang akan menjadi target capaian dan sebagai parameter berhasil atau tidaknya target tujuan tersebut. Adapun indikator kinerja utama sebagai tolak ukur capaian tujuan di Kecamatan Negreg, yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan satuan persentase.

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Kabupaten Bandung tahun 2025–2029, tim perumus Renstra Kecamatan Nagreg telah merumuskan moto Kecamatan Nagreg yaitu “NAGREG CERDAS” dengan filosofi semangat Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera). Pelayanan Kecamatan Nagreg harus Cerdas dalam arti harus Cepat, Efektif, Responsip, Dinamis, Akurat, dan Santun. Dengan moto Nagreg CERDAS, akan dijabarkan dalam prioritas pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan publik, pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan kebijakan peraturan perundang–undangan;
2. menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik, benar, transparan, dan akuntabel;
3. meningkatkan pengawasan proyek pembangunan hasil musrenbang di Kecamatan dengan melaksanakan koordinasi vertikal;
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. meningkatkan kualitas pengadaan bersifat rutin dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik;
6. meningkatkan kegiatan kewilayahan yang berkualitas dan tepat tujuan dan tepat sasaran;
7. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat;
8. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa;
9. meningkatkan fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kecamatan.

Tujuan, sasaran dan indikator serta target pencapaian Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Nagreg selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan peningkatan dalam sasaran strategis akan diukur melalui indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dalam proses realisasinya diperlukan adanya dukungan yang solid dari seluruh unit kerja maupun individu dari masing–masing pegawai Kecamatan dengan meningkatkan sinergitas dengan jajaran internal kantor Kecamatan maupun mambangun kinerja sinergitas dengan instansi eksternal maupun masyarakat.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nagreg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	0.60	0.06	0.35	0.36	0.38	0.39	0.42	Persentase dari selisih nilai IKM di Kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	90.15	90.20	90.52	90.85	91.20	91.56	91.95	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Renstra PD Kecamatan Nagreg 2025-2029

3.2. Strategi Kecamatan Nagreg dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Nagreg 2025-2029 dirancang dengan pendekatan bertahap untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pentahapan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program dan kegiatan yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak optimal bagi pengembangan sumber daya manusia aparatur. Berikut adalah pentahapan Renstra Kecamatan Nagreg 2025-2029:

Tahap I: Penguatan fondasi administrasi dan pelayanan publik serta peningkatan dan penguatan inovasi (2025-2026)

Penguatan Fondasi Administrasi dan Pelayanan Publik serta peningkatan dan penguatan inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima. Aparatur Kecamatan yang profesional yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam kinerja organisasi, dan selain itu mengoptimalkan monitoring dan pengawasan internal melalui SPIP dan pengelolaan manajemen risiko.

Tahap II: Penguatan kelembagaan (2027-2028)

Penguatan kelembagaan dan Musrenbang partisipatif, dengan melakukan optimalisasi pembagian kerja sesuai tupoksi yang diwujudkan dalam Tim kerja yang solid, penyusunan SOP pelayanan administrasi, meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan keuangan serta meningkatkan sistem informasi Kecamatan berbasis digital, dengan penguatan kelembagaan diharapkan Kecamatan Nagreg menjadi lembaga yang kuat, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tata kelola pemerintahan Kecamatan Nagreg berupaya untuk meningkatkan SDM aparatur melalui pembinaan disiplin, budaya kerja, dan usulan pelatihan ke BKPSDM.

Tahap III: Akselerasi dan optimalisasi program kewilayahan

Pada tahap ini, peningkatan tugas atributif dan delegatif Camat melalui Peningkatan koordinasi antar Instansi di Kecamatan dan peningkatan peran forum Kecamatan, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa serta melaksanakan kerjasama lintas instansi di wilayah Kecamatan guna mewujudkan ketentraman

dan ketertiban umum yang kondusif termasuk penanggulangan masalah lingkungan terutama terkait persampahan serta mendukung terhadap pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Tahap IV: Ekspansi (2029-2030)

Transformasi di Kecamatan Nagreg baik dari sisi pelayanan publik maupun performa aparatur Kecamatan harus telah melakukan perubahan, pelayanan publik pada tahap ini diharapkan sudah melakukan layanan berbasis elektronik yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dan transformasi aparatur (ASN) lebih responsif, kreatif dan inovatif.

Tahap V: Pemantapan (2030)

Mewujudkan Kecamatan Nagreg yang lebih bedas, maju dan berkelanjutan. Mewujudkan pelayanan publik yang lebih bedas, maju dan berkelanjutan adalah sebuah visi yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, ini menekankan pada transformasi ASN di Kecamatan Nagreg sebagai agen perubahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Bandung dengan tata kelola yang berbasis digital.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kecamatan Nagreg

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur Kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur Kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1) dan potensi lokal	(2) berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	(3) peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	(4) peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	(5) inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Nagreg dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan Kecamatan Nagreg Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai–nilai yang berkembang dalam internal serta situasi dan kondisi eksternal di lingkungan Kecamatan Nagreg. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan Kecamatan Nagreg, terutama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Pelayanan publik tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital bukan hanya untuk memperbaiki birokrasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan mengutamakan kepuasan masyarakat serta memperkuat pemberdayaan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan Nagreg diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan yang modern sekaligus motor penggerak pembangunan masyarakat.

Dengan adanya arah kebijakan Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Hal ini penting agar pembangunan di tingkat Kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, tidak berjalan secara parsial, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung. Adapun teknik merumuskan arah kebijakan Kecamatan Nagreg dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Nagreg

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan pada Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Nagreg selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya pencapaian target kinerja Kecamatan Nagreg akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah, dalam konteks pemerintahan program merupakan unit besar perencanaan pembangunan yang terdiri dari beberapa kegiatan. Dalam menunjang aktivitas pelayanan, Kecamatan ditunjang oleh 6 (enam) program yang terdiri dari 3 (tiga) program prioritas dan 3 (tiga) program pendukung. Dengan adanya kombinasi antara program prioritas dan program pendukung ini, diharapkan Kecamatan mampu menjaga keseimbangan antara

penguatan kapasitas internal Kecamatan dan optimalisasi pelayanan eksternal kepada masyarakat. Perencanaan program tidak hanya diarahkan untuk memastikan keberlangsungan fungsi birokrasi yang efektif, tetapi juga untuk menghadirkan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang menekankan pada terciptanya pelayanan publik yang responsif, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta penyelenggaraan pemerintahan umum yang kondusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Adapun rincian teknik merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Kecamatan Nagreg dapat dilihat Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Nagreg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di Kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perihal Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Agama dan Tokoh Masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya efektivitas koordinasi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Negara Kesatuan Republik Indonesia		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan yang Berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kecamatan dan Kelurahan		Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Pemberdayaan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan yang Berkaitan dengan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terlananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
				Terlananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terlananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah Kecamatan	Terlananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan yang Berkaitan dengan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Pengukuran dari Upaya Berkelanjutan yang Setiap Tahapannya Memberikan Perubahan atau Perbaikan Birokrasi Ke Arah yang Lebih Baik.
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan Daerah			
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Sumber: SIPD RENSTRA 2025-2029

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, diperlukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terencana, terstruktur, serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang oleh Kecamatan disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan didukung oleh sub kegiatan yang bersifat operasional dan berorientasi pada *output*. Keseluruhan proses ini diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Kecamatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan tercapainya sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan.

Dengan demikian, keterkaitan dan kesinambungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Adapun rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Kecamatan Nagreg untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01 - KECAMATAN				6.307.463.825,00		5.964.353.068,00		6.033.445.868,00		6.068.410.168,00		6.201.517.288,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.781.463.825,00		5.525.689.868,00		5.525.689.868,00		5.525.689.868,00		5.525.689.868,00	S.3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	50.86	51.00	5.781.463.825,00	52.00	5.525.689.868,00	53.00	5.525.689.868,00	54.00	5.525.689.868,00	55.00	5.525.689.868,00	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	63		65		67		69		71		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	58.000.000,00	3	38.000.000,00	3	38.000.000,00	3	38.000.000,00	3	38.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	20.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1	3.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1	3.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	3.000.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.839.263.000,00		4.844.763.000,00		4.844.763.000,00		4.844.763.000,00		4.844.763.000,00	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	4.839.263.000,00	1	4.844.763.000,00	1	4.844.763.000,00	1	4.844.763.000,00	1	4.844.763.000,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	4		4		4		4		4		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24		24		24		24		24		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.834.763.000,00		4.834.763.000,00		4.834.763.000,00		4.834.763.000,00		4.834.763.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24	4.834.763.000,00	24	4.834.763.000,00	24	4.834.763.000,00	24	4.834.763.000,00	24	4.834.763.000,00	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	4	1.500.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	2	1.500.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Dokumen BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0		1		1		1		1		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	10.000.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	50	12.500.000,00	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		50		50		50		50		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	10.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				145.000.000,00		91.500.000,00		91.500.000,00		91.500.000,00		91.500.000,00	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	145.000.000,00	4	91.500.000,00	4	91.500.000,00	4	91.500.000,00	4	91.500.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan												
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	20.000.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	10.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	15.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				-		-		-		-		-	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-		-		-		-	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	20.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	60.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		1		1		1		1		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	40.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	60.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				474.200.825,00		403.926.868,00		403.926.868,00		403.926.868,00		403.926.868,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	474.200.825,00	12	403.926.868,00	12	403.926.868,00	12	403.926.868,00	12	403.926.868,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.600.825,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	18.600.825,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				455.600.000,00		383.926.868,00		383.926.868,00		383.926.868,00		383.926.868,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	455.600.000,00	12	383.926.868,00	12	383.926.868,00	12	383.926.868,00	12	383.926.868,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	155.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	0		9		9		9		9		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	9		9		9		9		9		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4		4		4		4		4		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	9	45.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	0	-	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4	10.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				210.000.000,00		233.663.200,00		312.756.000,00		342.720.300,00		480.827.420,00	S.3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	100	210.000.000,00	100	233.663.200,00	100	312.756.000,00	100	342.720.300,00	100	480.827.420,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Persesentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	1	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1	1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				200.000.000,00		198.663.200,00		277.756.000,00		307.720.300,00		445.827.420,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	1	200.000.000,00	1	198.663.200,00	1	277.756.000,00	1	307.720.300,00	1	445.827.420,00	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	1	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				200.000.000,00		188.663.200,00		267.756.000,00		297.720.300,00		435.827.420,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	200.000.000,00	1	188.663.200,00	1	267.756.000,00	1	297.720.300,00	1	435.827.420,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				135.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	100	135.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				35.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	4	35.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1		1		1		1		1		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	4	5.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				30.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	30.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				40.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	4	40.000.000,00	4	26.000.000,00	4	26.000.000,00	4	26.000.000,00	4	26.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	4		4		4		4		4		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	4	5.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				60.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan													
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	40	60.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	0		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	0		40		40		40		40		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	40		40		40		40		40		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	40		40		40		40		40		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	50		50		50		50		50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	0		40		40		40		40		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50	0		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		0		40		40		40		40		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	40		40		40		40		40		
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		0	-	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara													
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	0	-	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	40	10.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50	0	-	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				10.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	40	10.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	50	10.000.000,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	40	10.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	0	-	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	0	-	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	40	10.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	40	3.000.000,00	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				10.000.000,00		-		-		-		-	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			10.000.000,00		-		-		-		-	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlasanya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlasananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				80.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	80.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				80.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			80.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250	250		250		250		250		250		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional												
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila												
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan												
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250	250	60.000.000,00	250	24.000.000,00	250	24.000.000,00	250	24.000.000,00	250	24.000.000,00	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				-		-		-		-		-	
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			-		-		-		-		-	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				61.000.000,00		61.000.000,00		51.000.000,00		56.000.000,00		51.000.000,00	S.3.1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah Kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	100	61.000.000,00	100	61.000.000,00	100	51.000.000,00	100	56.000.000,00	100	51.000.000,00	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				61.000.000,00		61.000.000,00		51.000.000,00		56.000.000,00		51.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			61.000.000,00		61.000.000,00		51.000.000,00		56.000.000,00		51.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0		7		0		1		0		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan												
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan												
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan												
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		10.000.000,00		-		5.000.000,00		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	-	7	10.000.000,00	0	-	1	5.000.000,00	0	-	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				-		-		-		-		-	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				-		-		-		-		-	
Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-		-		-		-		-	
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			-		-		-		-		-	

Sumber: SIPD RENSTRA 2025-2029

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan, maka disusunlah rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan kewenangan camat. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan ini disusun secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan operasional yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci, serta didukung oleh alokasi pendanaan yang realistis dan proporsional berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pendanaan terhadap program kegiatan dalam Renstra ini bersifat indikatif sebagai proyeksi kebutuhan jangka menengah yang bisa berubah pada saat penjabaran ke dalam Renja Kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun Renja, angka ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan tahunan dan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan daerah.

Target dari indikator tujuan dan sasaran merupakan target kinerja yang harus dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada termasuk pendanaan yang harus digunakan secara efektif dan efisien guna menghasilkan hasil berupa *output* dan *outcome* yang akan memberikan kontribusi dan dampak terhadap capaian target daerah.

Program prioritas yaitu program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan. Adapun program pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib, serta program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah Kecamatan.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Nagreg, 2025

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan dengan Indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja, baik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Kecamatan Nagreg yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Nagreg dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nagreg

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen (%)	0,6	0,06	0,35	0,36	0,38	0,39	0,42	Persentase dari selisih nilai IKM di Kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: SIPD RENSTRA Kecamatan Nagreg 2025-2029

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Pada tingkat Kecamatan terdapat tantangan signifikan

tentang IKK yang terstruktur dan sesuai terstandardisasi. IKK ini menyebabkan terarahnya tujuan Kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja secara objektif, serta kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang IKK.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Nagreg

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen (%)	0,6	0,06	0,35	0,36	0,38	0,39	0,42	Persentase dari selisih nilai IKM di Kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: SIPD RENSTRA Kecamatan Nagreg 2025-2029

4.5. Inovasi Kecamatan Nagreg

Kecamatan Nagreg dalam upaya meningkatkan peran dan fungsinya melalui Kebijakan untuk mencapai tujuannya, juga dilakukan Inovasi terhadap Layanan Publik dan bidang penyelenggaraan Pemerintahan:

1. Inovasi Nagreg CERDAS (Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat dan Santun)

   Inovasi ini guna menunjang Pelayanan Publik yang Cepat dan Akurat, dimana melalui Inovasi ini pelayanan dapat diakses melalui WhatsApp, dan selain itu dalam pengadministrasian pelayanan dilakukan secara Real Time sehingga Jumlah Jenis Layanan, Jumlah Pemohon yang dipisahkan berdasarkan Jenis kelamin, Alamat (Kp, RT/RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, sehingga dengan Inovasi Nagreg Cerdas, Pelayanan tiap waktu dapat diakses secara Real Time.

2. Inovasi Nagreg SIPPINTER (Sistem Pembinaan dan Pengawasan Internal terintegrasi)

   Sesuai dengan PP 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan salah satu Tugas Atributif Kecamatan adalah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Desa, dan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2021 tentang pengawasan Pengelolaan keuangan Desa, bahwa pengawasan pengelolaan

keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Camat dan BPD, sehingga dengan Tugas tersebut peran Kecamatan menjadi sangat strategis dan disisi lainnya tugas camat merupakan hal yang sangat berat apabila tidak ditunjang oleh sebuah Inovasi yang mampu mempermudah pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

Untuk menunjang tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan Inovasi Nagreg SIPPINTER, selain melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, juga dilakukan terhadap pengumpulan data kemiskinan, stunting dan data lainnya yang melibatkan seluruh unit leading sektor pada struktural Kecamatan dengan integrasi seluruh kepentingan, dengan Inovasi ini pembinaan menjadi lebih efektif dan efisien dan disisi lain menunjang terhadap efisiensi anggaran.

Untuk sementara ini Inovasi ini ditunjang dengan Link Drive yang aksesnya dibatasi terhadap Email yang sudah terdata dari Desa dan untuk di Kecamatan otoritasnya ada pada Sekretaris Kecamatan yang aksesnya dibantu oleh Staf Program dan keuangan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Kecamatan Nagreg ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan Kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada RPJMD serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Renja Kecamatan Nagreg setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Renstra Kecamatan Nagreg juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, Kecamatan Nagreg diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Nagreg tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Nagreg dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kecamatan Nagreg 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Nagreg tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Renja Kecamatan Nagreg untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Renstra Kecamatan Nagreg harus dijadikan pedoman penyiapan Renja dan Anggaran Kecamatan Nagreg (RKA–DPA Kecamatan Nagreg).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Nagreg diluar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan/perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja PD Kecamatan Nagreg, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat Kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup

evaluasi internal oleh Kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP). Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan aparatur Kecamatan Nagreg dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat tangguh adaptif, inovatif, dan kreatif.

Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Mengutip sebuah kata bijak “Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan” (Abdullah Gymnastiar, Pendakwah, Penulis Buku dan Pengusaha).

Nagreg, September 2025

CAMAT NAGREG

Ttd

PERDANA FIRMANSYAH

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Kecamatan Nagreg berdasarkan Jenis kelamin 42
Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan 42
Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 42
Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Nagreg yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Eselon Tahun 2020-2025..... 43
Tabel 2.5 Data Aset di Kecamatan Nagreg..... 44
Tabel 2.6 Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan Nagreg..... 45
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kecamatan Nagreg 46
Tabel 2.8 Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Nagreg 46
Tabel 2.9 Klasifikasi, Kategori, dan Tipologi Desa..... 46
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 50
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 53
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung..... 66
Tabel 2.13 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi 81
Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 89
Tabel 2.15 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Nagreg 93
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nagreg.. 99
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kecamatan Nagreg..... 101
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Nagreg..... 103
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Nagreg..... 106
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan..... 149
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 187
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nagreg..... 188
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Nagreg..... 189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Nagreg 28
Gambar 2.2 Cascading Misi Pembangunan 3 85
Gambar 2.3 Pohon Masalah Kecamatan Nagreg 95